



INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



2023

 inspektorat.jember@gmail.com

 (0331) 428823

 Jalan Sudarman No. 1 Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Inspektorat Kabupaten Jember. Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2023.

16 Februari 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT
RATNO C. SEMBODO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740827 200501 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
E. ISU STRATEGIS.....	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	8
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	15
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	15
B. CAPAIAN KINERJA.....	16
C. REALISASI ANGGARAN.....	47
BAB IV. PENUTUP.	51
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA.....	51
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN.....	51
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 - 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Inspektorat Daerah Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

(5) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
7. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 40 ASN dan 6 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Jember
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Inspektur	1	
2	Sekretaris	1	
3	Inspektur Pembantu	5	2 Plt
4	Kepala Sub Bagian Adm dan Umum	0	
5	Jabatan Fungsional	18	
6	Pelaksana / Pengadministrasi	14	
7	Petugas Keamanan	1	
Jumlah		40	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

NO	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I	IV / b	4
2	Pembina	IV / a	5
3	penata Tk I	III / d	4
4	Penata	III / c	7
5	Penata Muda Tk I	III / b	5
6	Penata Muda	III / a	7
7	Pengatur Tk I	II / d	3
8	Pengatur	II / c	4
9	Pengatur Muda Tk I	II / b	0
10	Pengatur Muda	II / a	1
Jumlah			40

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Inspektorat Daerah
Kabupaten Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

NO	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	SLTP	1	ASN
2	SMA/STM	7	ASN
3	D3	0	ASN
4	S1	27	ASN

5	S2	5	ASN
6	SD	0	NON ASN
7	SLTP	0	NON ASN
8	SMA/STM	1	NON ASN
9	D3	0	NON ASN
10	S1	5	NON ASN
11	S2	0	NON ASN
Jumlah		46	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi belum optimal
2. Proses pencegahan korupsi belum terintegrasi, Pembangunan Zona Integritas belum berjalan serta Tindak lanjut rencana aksi pencegahan terintegrasi belum terkoordinasikan dengan maksimal
3. Penyelenggaraan sistem AKIP belum berjenjang sampai level pelaksana
4. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset belum optimal
5. Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern belum optimal

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 dan tujuan ke-1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember

sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Tujuan : Tingkat Maturitas SPIP

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SEBELUM PERUBAHAN							
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan penguatan aksi pencegahan korupsi	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1				
SETELAH PERUBAHAN							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	35%	40%	50%	60%	65%	70%
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber data : tabel T-C.25 pada Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator or Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata	Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD yang melaksanakan manajemen resiko	50%				1.059.351.000

kelola pemerintahan yang baik												
						Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	40 %					
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase laporan hasil pengawasan internal yang diselesaikan	50 %					968.771.000
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Lap		115.520.000
								Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	226 LHP		369.440.000
								Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Lap		100.000.000
								Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Lap		150.000.000
								Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap		110.800.000
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dok		123.011.000
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	80 %					90.580.000
								Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer	4 LAP		21.140.000

								Negara/ Daerah	ah yang Ditangani		
								Pengaw asan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksa an (LHP) dengan Tujuan tertentu	70 LAP	69.440.0 00
		Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Program Perumusa n Kebijakan ,Pendampi ngan dan Asistensi	Nilai Sakip Kabupaten	75(BB)				1.255.3 40.000
					Kegiatan Perumusa n Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an dan Fasilitasi Pengawas an	Prosentase kebijakan Teknis yang dirumuskan	100 %				50.000.0 00
								Perumu san Kebijaka n Teknis di Bidang Pengaw asan	Jumlah Rekomendas i Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekome ndasi	50.000.0 00
					Kegiatan Asistensi dan Pendampi ngan	Prosentase rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi	65 %				1.205.34 0.000
								Pendam pingan dan Aistensi Urusan Pemerin tahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampi ngan dan Asistensi Urusan Pemerinta han	4 Perangk at Daerah	50.000.0 00
								Pendam pingan, Asistens i, Verifikas i dan Penilaian Reforma si Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangk at daerah	62.640.0 00
								Koordin asi, Monitori ng dan Evaluasi serta Verifikas i	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	10 Keg	999.350. 000

								Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	dan Pemberantasan Korupsi		
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72 Perangkat Daerah	93.350.000

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

CASCADING INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Misi 1 Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah

Tujuan	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				INSPEKTORAT
Indikator Tujuan	Tingkat Maturitas SPIP				
Sasaran	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan Penguatan aksi pencegahan korupsi				INSPEKTUR
Indikator Sasaran	Tingkat kapabilitas APIP				
Program	Penyelenggaraan Pengawasan		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		IRBAN
Indikator Program	Prosentase OPD yang melaksanakan Manajemen Resiko	Prosentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti :- - Audit, Reviu & Evaluasi - Pengawasan dengan	Nilai Sakip Kabupaten		
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Asistensi dan Pendampingan	Jabatan Fungsional Tertentu
Indikator Kegiatan	Jumlah lhp yang dilakukan Audit	1. Jumlah rekomendasi kerugian yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kasus yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Pedoman SOP yang terselesaikan	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP	
Sub Kegiatan	1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Desa 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	1. Sub Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jabatan Fungsional Tertentu
Indikator Sub Kegiatan	Laporan Hasil Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan teknis Pengawasan yang diterbitkan/disusun	Laporan Hasil Pengawasan	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Nomor: 700/6/35.09.410/2023 tertanggal 3 Januari 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional /Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal}} \times 100 \%$	IRBAN	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	IRBAN	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-

program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50 %
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level kapabilitas APIP	Level 2

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi tahun 2023 sebesar disesuaikan dengan anggaran yang ada di PK Perubahan 2023 dimana total anggaran sebesar Rp. 13.443.767.141,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50 %	48,5 %	97 %

2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan		Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100%
Rata Rata Capaian						98,5 %

Sumber Data: 1. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
2. Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Spip Terintegrasi Dan Kapabilitas Apip Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 oleh BPKP

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata rata capaian dari 2 (dua) indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember rata rata mencapai 98% dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pengawasan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 -2026
Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
<i>Renstra 2016-2021</i>							
Efektifitas Pengawasan	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang	5%	-	-	4,75%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	95%	-	-	95%	-	-

	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan	95%	-	-	95%	-	-
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik	100%	-	-	100%	-	-
Renstra Sebelum Perubahan 2021-2026							
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan Penguatan aksi pencegahan korupsi	Level Kapabilitas APiP		Level 1	-	-	Level 2	-
Renstra Setelah Perubahan 2021 - 2026							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		-	50%	-	-	48,50%
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level kapabilitas APiP		Level 1	Level 2	-	Level 2	Level 2

- Sumber Data:* 1. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APiP dan BPK
2. Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Spip Terintegrasi Dan Kapabilitas Apip Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 oleh BPKP

Keterangan:

Pada tahun 2021 capaian kinerja masih mengacu pada renstra periode tahun 2016 – 2021 sedangkan renstra tahun 2021-2026 renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Jember mengalami perubahan di Tahun 2023, sehingga pada tahun 2022 capaian kinerja Inspektorat Daerah kabupaten Jember masih mengacu pada renstra periode 2021-2026 (sebelum perubahan) dan untuk pada tahun 2023 capaian kinerja Inspektorat Daerah kabupaten Jember masih mengacu pada renstra perubahan periode 2021-2026.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Akhir Periode Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2021-2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	70 %	48,5 %	69%
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas Pelaksanaan pengawasan	level kapabilitas APIP dan prosentase penurunan	Level 3 (3.00)	Level 2 (2.910)	97%

Sumber Data: 1. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK

2. Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Spj Terintegrasi Dan Kapabilitas Apip Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 oleh BPKP

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI	REALISASI NASIONAL	KET.
			2023	2023	
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	48.50%	NIHIL	
II	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level kapabilitas APIP	Level 2	NIHIL	

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD dengan indikator Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 tidak ada dikarenakan sasaran strategis tersebut baru ada pada renstra perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember yaitu pada awal tahun 2023 sehingga peningkatan dari capaian kinerja di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 masih belum bisa dijadikan ukuran peningkatan capaian, namun jika dilihat dari target, capaian dan realisasi yang ditetapkan di tahun 2023 yang didasarkan atas renstra perubahan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan** dari nilai target yang ditetapkan sebesar 50 %, capaian sebesar 48,5 % dan realisasi sebesar 97 %. Jika diukur dari target sampai akhir periode tahun 2026 di dalam renstra perubahan sebesar 70% dan realisasi di tahun 2023 sebesar 48.5 % maka capaian Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sebesar 69 % kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masuk dalam kategori **Baik**

Penjelasan perbandingan realisasi kinerja indikator % Inspektorat Kabupaten Jember dengan realisasi kinerja indikator % Nasional tidak bisa disajikan karena tidak tersedia data realisasi nasional untuk indikator ini.

➤ **Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Prosedur dan efektivitas Pelaksanaan pengawasan dengan indikator Tingkat kapabilitas APiP pada tahun 2022 sasaran tersebut tidak ada dikarenakan sasaran strategis tersebut baru ada pada renstra perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember yaitu pada awal tahun 2023, namun secara penetapan Indikator Sasarannya sama antara tahun 2022 dengan tahun 2023 sehingga peningkatan dari capaian kinerja di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 masih bisa dijadikan ukuran peningkatannya yaitu dengan perbandingan capaian pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masuk pada Level 2 dari target yang ditetapkan Level 1 hal tersebut bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah tercapai 100 % masuk pada

Level 2 dari target yang ditetapkan Level 2, namun jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan 2022, capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2023 masih berjalan Stagnan hal tersebut disebabkan karena perencanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masih berbasis faktor resiko masih belum berbasis manajemen resiko. Jika diukur dari target sampai akhir periode tahun 2026 di dalam renstra perubahan sebesar 3.00 kategori Level 3 dan realisasi di tahun 2023 sebesar 2.910 (Level 2) maka capaian Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sebesar 97 % kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masuk dalam kategori ***Sangat Memuaskan***

Penjelasan perbandingan realisasi kinerja indicator % Inspektorat Kabupaten Jember dengan realisasi kinerja indicator % Nasional tidak bisa disajikan karena tidak tersedia data realisasi nasional untuk indikator ini.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD dengan Indikator : Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	√						
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas Pelaksanaan pengawasan	100%	√						

dengan Indikator Level Kapabilitas APIP									
Rata rata capaian	98,5%	√							

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam kategori Sangat Memuaskan

➤ **Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD dengan Indikator Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, pada tahun 2023 realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sebesar 48,5% dari target yang telah di tetapkan sebesar 50 % dengan perhitungan capaian sebesar 97% kategori sangat memuaskan. Penyebab keberhasilan yaitu komitmen pimpinan, jumlah anggaran, integritas dan membangun hubungan kerja yang baik mulai dari level staf sampai dengan level pimpinan tertinggi Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD adalah :

1. Kurangnya jumlah SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Masih belum menerapkan manajemen resiko mulai dari level bawahan sampai dengan level pimpinan tertinggi
3. Budaya kerja masih belum terbangun secara maksimal

Solusi yang direncanakan terhadap permasalahan tersebut adalah :

1. Mengirimkan surat usulan permohonan penambahan SDM yang berkompeten kepada OPD terkait (BKPSDM) baik melalui pengadaan CPNSD maupun P3K
2. Membuat kebijakan (Perkada) dan melakukan pendampingan serta asistensi terhadap OPD dalam penerapan Manajemen Resiko
3. Melakukan penegakan disiplin kerja pegawai dengan memberikan reward and pusionishment

4. Memaksimalkan SDM yang ada dengan cara mengembangkan kompetensi SDM secara intens melalui kegiatan-kegiatan diklat/bimtek/PKS baik yang diadakan sendiri/PEMDA maupun oleh pemerintah pusat

➤ **Sasaran Strategis 2:**

Meningkatnya Prosedur dan efektivitas Pelaksanaan pengawasan dengan Indikator Level Kapabilitas APIP pada tahun 2023 realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Level 2 dari target yang telah ditetapkan Level 2 dengan perhitungan capaian sebesar 100 % kategori sangat memuaskan. Penyebab keberhasilan yaitu komitmen pimpinan, jumlah anggaran, integritas dan membangun hubungan kerja yang baik mulai dari level staf sampai dengan level pimpinan tertinggi.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam upaya Meningkatkan Prosedur dan efektivitas Pelaksanaan Pengawasan adalah :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masih menerapkan system Perencanaan Pengawasan Berbasis Faktor Resiko belum berbasis manajemen resiko
2. Kurangnya sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sampai dengan tahun 2023, berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan, dengan ruang lingkup tugas dan cakupan PD/ unit kerja yang dibina, kebutuhan SDM dan kompetensinya adalah sebagai berikut:
 - Kebutuhan SDM untuk Auditor sejumlah 15 (lima belas) orang tersedia sebanyak 4 (empat) orang
 - Kebutuhan SDM untuk P2OPD sejumlah 28 (dua puluh delapan) tersedia sebanyak 15 (lima belas) orang

Solusi yang direncanakan terhadap permasalahan tersebut adalah :

- Mengirimkan surat usulan permohonan penambahan SDM yang berkompeten kepada OPD terkait (BKPSDM) baik melalui Mutasi/rotasi ASN, pengadaan CPNSD maupun P3K

- Memaksimalkan SDM yang ada dengan cara mengembangkan kompetensi SDM secara intens melalui kegiatan-kegiatan diklat/bimtek/PKS baik yang diadakan sendiri/PEMDA maupun oleh pemerintah pusat

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Jember sesuai dengan tupoksinya pada tahun 2023 capaian RB general dengan indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mencapai target level 3 yaitu dengan nilai 3.059

B.3 ANALISA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2022 didukung 3 (tiga) Program 11 (sebelas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun
2023

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
I	Sasaran Strategis (Non Prioritas) Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah <i>Persentase Indikator Program yang tercapai</i>	100%	100%	100%
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Persentase terlaksananya</i>	100%	100%	100%

	<i>kelancaran urusan rutin pemerintahan daerah</i>			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
	Input : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100%
	Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	100%
	Outcome : Kegiatan Perencanaan yang terlaksana	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Input : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Data Kebutuhan Perencanaan	65 LHE	65 LHE	100%
	Output : Tercapainya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	65 LHE	65 LHE	100%
	Outcome : Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Persentase terlaksananya administrasi keuangan</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Input :		574 Org/Bln	100%

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Org/Bln		
	Output : Tercukupinya Gaji Yang Diterima perbulan	574 Otg/Bln	574 Otg/Bln	100%
	Outcome : Terpenuhi Gaji Pegawai	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Input : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Dok	12 Dok	100%
	Outcome : Terpenuhi kebutuhan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Input : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
	Output : Tercukupinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
	Outcome : Terpenuhi Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :			

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Input : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Org	4 Org	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Org	4 Org	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai yang berkualitas	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			
	Input : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Org	90 Org	100%
	Output : Tercapainya Kebutuhan SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Org	90 Org	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input :	1 Paket	1 Paket	100%

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Output : Tercukupinya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Outcome : terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Input : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Output : Tercukupinya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Outcome : Terpenuhinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Input : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Output : Tercukupinya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Outcome : Terpenuhinya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Input :	12 Dok	12 Dok	100%

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Output : Tercukupinya Jumlah Kebutuhan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	100%
	Outcome : Terpenuhi penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%
	Input : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%
	Input : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Lap	84 Lap	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Lap	84 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%
	Kegiatan :	100%	100%	100%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor</i>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
	Input : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan per bulan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan per bulan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Input : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Input : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Output : Tercukupinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Input : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%
	Output : Tercukupinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	16 Unit	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :			

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Input : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100%
	Output : Tercukupi Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	100%
	Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%
II	Sasaran Strategis 1 (Proritas) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD <i>Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</i>	50%	48,5%	97%
2.	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN <i>OPD yang melaksanakan manajemen risiko</i>	50%	48%	96%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal <i>Persentase LHP yang diterbitkan dan telah ditindaklanjuti</i>	70%	65%	93%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
	Input : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	1 Lap	100%
	Output : Tercapainya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	1 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :			

	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
	Input : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Lap	40 Lap	100%
	Output : Tercapainya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Lap	40 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja			
	Input : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Lap	4 Lap	100%
	Output : Tercapainya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Lap	4 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan			
	Input : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Lap	9 Lap	100%
	Output : Tercapainya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Lap	9 Lap	100%
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengawasan Desa			
	Input : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	226 Lap	226 Lap	100%
	Output :	226 Lap	226 Lap	100%

	Tercapainya Laporan Hasil Pengawasan Desa			
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Pengawasan Desa	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
	Input : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dok	15 Dok	100%
	Output : Tercapainya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dok	15 Dok	100%
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	100%	100%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu <i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti dan yang terselesaikan</i>	80%	78%	98%
	Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
	Input : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Lap	0	0
	Output : Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Lap	0	0

	Outcome : Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100%	0%	0%
III	Sasaran Strategis 2 (Proritas) : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan <i>Tingkat kapabilitas APIP</i>	Level 2	Level 2	100%
3.	Program : PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI <i>Persentase OPD dengan Nilai sakip kategori baik</i>	75%	75%	100%
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan <i>Persentase Rekomendasi/ Dokumen /Pedoman Pengawasan yang terselesaikan/ diterbitkan</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
	Input : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%
	Output : Tersusunya Dokumen Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Dok	3 Dok	100%
	Outcome : Terselesaikannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100%	100%	100%
	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Persentase OPD yang telah menerapkan SPI	65%	65%	100%
	Sub Kegiatan :			

	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
	Input : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 PD	4 PD	100%
	Output : Tercapainya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 PD	4 PD	100%
	Outcome : Terpenuhinya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
	Input : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 PD	15 PD	100%
	Output : Tercapainya Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 PD	15 PD	100%
	Outcome : Terlaksananya kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
	Input : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Keg	4 Keg	100%
	Output :	4 Keg	4 Keg	100%

	Tercapainya pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
	Outcome : Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
	Input : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	2 PD	100%
	Output : Tercapainya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	2 PD	100%
	Outcome : Terlaksananya kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	100%	100%

**FOTO-FOTO KEGIATAN PRIORITAS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan

A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:

a. Foto Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah



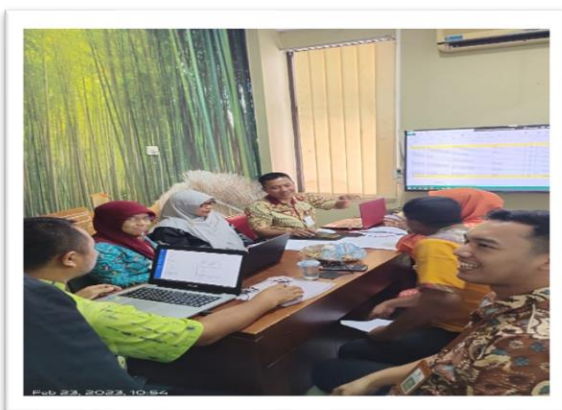
b. Foto Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah



c. Foto Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja



d. Foto Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan



e. Foto Sub Kegiatan Pengawasan Desa



f. Foto Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP



B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

a. Foto Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

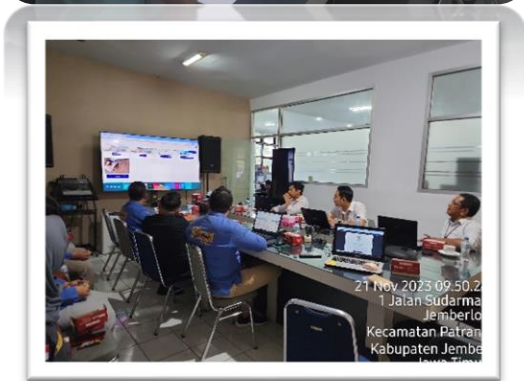
A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

a. Foto Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan



B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

a. Foto Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi di Daerah



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

b. Foto Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi



- c. Foto Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Saber Pungli



Hakordia

- d. Foto Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



Pendampingan dan Asistensi Zona Integritas di
DISPENDUKAPIL



Pendampingan dan Asistensi Zona Integritas
di PKM UMBULSARI

C. Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi SDM

- a. Foto Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



DIKLAT KOMPETENSI PPBR



DIKLAT AUDIT BMD

Foto Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP

b. Foto Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal)



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	97 %	77%	efisien
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan ngan industrial	100%	83%	efisien

Sumberdaya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Jember berjumlah 46 orang dengan rincian 7 pejabat struktural, 21 pelaksana/Administrasi, jabatan fungsional 18, 1 petugas keamanan dan 6 Non ASN.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan didukung anggaran sebesar Rp 13.443.767.141,- dan terserap sebesar Rp. 11.765.699.478

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dengan rata- rata capaian 97 %

Pada tahun 2023 Inspektorat dalam rangka pencapaian kinerja yang efektif melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran terhadap program/kegiatan/sub-kegiatan antara lain;

Tabel 3.8
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023

NO	PROG/KEG/SUB KEG	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BER KURANG	KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	11.349.325.224	11.129.076.141	(220.249.083)	

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.015.000	157.624.000	(121.391.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.800.000	-	(64.800.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.215.000	157.624.000	(56.591.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.218.309.424	6.924.140.817	(294.168.607)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.079.051.842	5.945.582.521	(133.469.321)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan dikembalikan ke TAPD agar bisa diperuntukan untuk OPD yang lain
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.139.257.582	978.558.296	(160.699.286)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan dikembalikan ke TAPD agar bisa diperuntukan untuk OPD yang lain
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	622.772.500	818.964.500	196.192.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	307.022.500	319.522.500	12.500.000	Tambahan atas hasil pengeseran Sub-Keg lain
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.750.000	79.000.000	(19.750.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	217.000.000	420.442.000	203.442.000	Tambahan atas hasil pengeseran Sub-Keg lain

	Perundang-Undangan				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.254.318.300	2.788.636.824	534.318.524	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	655.089.200	1.335.283.024	680.193.824	Tambahan atas hasil pergeseran Sub-Keg lain
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.817.800	7.655.200	(21.162.600)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.459.300	64.805.600	2.346.300	Tambahan atas hasil pergeseran Sub-Keg lain
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	176.792.000	225.442.000	48.650.000	Tambahan atas hasil pergeseran Sub-Keg lain
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.326.660.000	1.150.951.000	(175.709.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	577.200.000	-	(577.200.000)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	577.200.000	-	(577.200.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.800.000	31.800.000	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000	28.800.000	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	365.910.000	407.910.000	42.000.000	

	Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.000.000	83.000.000	(8.000.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.000.000	233.000.000	30.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.910.000	91.910.000	20.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.841.558.500	1.059.351.000	(782.207.500)	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.526.244.500	968.771.000	(557.473.500)	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162.908.000	110.800.000	(52.108.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	208.636.500	115.520.000	(93.116.500)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Reviu Laporan Kinerja	126.676.000	100.000.000	(26.676.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Reviu Laporan Keuangan	286.728.000	150.000.000	(136.728.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain

	Pengawasan Desa	598.576.000	369.440.000	(229.136.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan dikembalikan ke TAPD agar bisa diperuntukan untuk OPD yang lain
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142.720.000	123.011.000	(19.709.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	315.314.000	90.580.000	(224.734.000)	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	148.274.000	21.140.000	(127.134.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan dikembalikan ke TAPD agar bisa diperuntukan untuk OPD yang lain
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	167.040.000	69.440.000	(97.600.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.886.365.000	1.255.340.000	(631.025.000)	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	96.926.000	50.000.000	(46.926.000)	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	96.926.000	50.000.000	(46.926.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Pendampingan dan Asistensi	1.789.439.000	1.205.340.000	(584.099.000)	

	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000	50.000.000	(165.000.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	158.424.000	62.640.000	(95.784.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan digeser di Sub-Keg Lain
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.252.665.000	999.350.000	(253.315.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan dikembalikan ke TAPD agar bisa diperuntukan untuk OPD yang lain
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	163.350.000	93.350.000	(70.000.000)	Dilakukan efisiensi anggaran dengan dikembalikan ke TAPD agar bisa diperuntukan untuk OPD yang lain
	JUMLAH	15.077.248.724	13.443.767.141	(1.633.481.583)	

Dari table di atas bisa dilihat bahwa Inspektorat dalam pencapaian target kinerja telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.633.481.583,- dari APBD 2023 sebesar Rp. 15.077.248.724,- menjadi P-APBD sebesar Rp. 13.443.767.141,-

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.443.767.141,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional sebesar Rp 12.353.630.041,-
- Belanja Modal sebesar Rp 1.090.137.100,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.9
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.129.076.141	9.908.870.118	89%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.624.000	155.590.000	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.624.000	155.590.000	99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.924.140.817	6.280.735.444	91%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.945.582.521	5.461.616.891	92%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	978.558.296	796.015.680	81%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	818.964.500	523.953.000	64%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	319.522.500	249.300.000	78%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.000.000	77.153.000	98%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	420.442.000	197.500.000	47%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.788.636.824	2.542.316.419	91%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.335.283.024	1.243.369.500	93%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.655.200	6.164.442	81%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.805.600	57.014.800	88%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	3.690.000	82%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	225.442.000	193.255.054	86%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.150.951.000	1.038.822.623	90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.800.000	21.166.298	67%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	551.500	18%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000	20.614.798	72%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.910.000	385.108.957	94%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.000.000	66.443.915	80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.000.000	227.511.900	98%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.910.000	91.153.142	99%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.059.351.000	813.494.360	77%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	968.771.000	749.499.360	77%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	110.800.000	104.480.000	94%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	115.520.000	109.145.000	94%
	Reviu Laporan Kinerja	100.000.000	98.000.000	98%
	Reviu Laporan Keuangan	150.000.000	147.700.000	98%
	Pengawasan Desa	369.440.000	192.875.000	52%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	123.011.000	97.299.360	79%

	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	90.580.000	63.995.000	71%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	21.140.000	0	0%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	69.440.000	63.995.000	92%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.255.340.000	1.043.335.000	83%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	50.000.000	49.000.000	98%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.000.000	49.000.000	98%
	Pendampingan dan Asistensi	1.205.340.000	994.335.000	82%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	48.750.000	98%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	62.640.000	58.140.000	93%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	999.350.000	838.645.000	84%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	93.350.000	48.800.000	52%
		13.443.767.141	11.765.699.478	88%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.765.699.478 dari total anggaran Rp. 13.443.767.141 atau 88 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 5 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 12.301.263.229,- terealisasi sebesar Rp 10.162.743.229,- atau 83 %. Kenaikan ini disebabkan karena adanya percepatan pemulihan covid-19.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Sangat Memuaskan** karena dari 2 (dua) indikator sasaran pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 11.765.699.478 (88%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

5. Kurangnya jumlah SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif
6. Masih belum menerapkan manajemen resiko mulai dari level bawahan sampai dengan level pimpinan tertinggi
7. Budaya kerja masih belum terbangun secara maksimal
8. Belum menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPSDM baik melalui mutasi pegawai ataupun melalui rekrutmen CPNSD & Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2. Perumusan Kebijakan dan Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko
3. Komitmen pimpinan tertinggi untuk membangun budaya kerja baru

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024



**MATRIK RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SEBELUM PERUBAHAN													
1	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP			Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)					1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2.. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3. Kapabilitas APIP.	1. Penerapan MR dalam menunjang tercapainya Good Governance and Clean Government 2. Pelaksanaan Pecegahan Korupsi terintegrasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember 3. Peningkatan SDM	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2.. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
1			Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan penguatan aksi pencegahan korupsi	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1					1. Penambahan SDM dan Meningkatkan kompetensi aparat pengawas yang profesional baik melalui diklat, seminar, PKS maupun koordinasi pengawasan 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini 3. Menciptakan suasana kondusif dan itikat baik untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional 4. Mengadakan sosialisasi/Bimtek terhadap beberapa OPD berkaitan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang baru 5. Mengadakan reviu dan evaluasi secara berkala atas sistem manajemen dan kinerja untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Jember 6. Melakukan Pendampingan dan Asistensi secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan 3. Melakukan pencegahan Korupsi dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi serta meningkatkan integritas	
SETELAH PERUBAHAN													
1	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP					Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2.. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 3. Kapabilitas APIP.	1. Penerapan MR dalam menunjang tercapainya Good Governance and Clean Government 2. Pelaksanaan Pecegahan Korupsi terintegrasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember 3. Peningkatan SDM	Program Penyelenggaraan Pengawasan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			50%	60%	65%	70%	1. Mengadakan reviu dan evaluasi secara berkala atas sistem manajemen dan kinerja untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Jember 2. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) 3. Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi APIP 4. Melakukan percepatan tindak lanjut atas temuan Eksternal dan Internal 5. Melakukan pengawasan secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel 2. Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi	
2			Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP			Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	1. Penambahan SDM dan Meningkatkan kompetensi aparat pengawas yang profesional baik melalui diklat, seminar, PKS maupun koordinasi pengawasan 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini 3. Menciptakan suasana kondusif dan itikat baik serta budaya kerja untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional 4. Mengadakan sosialisasi/Bimtek terhadap beberapa OPD berkaitan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang baru 5. Melakukan pendampingan & Asistensi serta memberikan sarana Consulting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance dan clean government)	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur serta fasilitasi pengawasan 2. Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 3. Membangun sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik (Good Governance and Clean Government) melalui reformasi birokrasi dengan melakukan Pendampingan, Asistensi secara intensif 4. Melakukan pencegahan Korupsi dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi serta meningkatkan integritas 5. Melakukan pendampingan dan evaluasi penerapan SPIP pada perangkat daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Jember, 3 Maret 2023


INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT
U. RATNO C. SEMBODO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740827 200501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD yang melaksanakan manajemen resiko	50%				1.059.351.000
						Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	40 %				

					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase laporan hasil pengawasan internal yang diselesaikan	50 %				968.771.000
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Lap	115.520.000
								Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	226 LHP	369.440.000
								Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Lap	100.000.000
								Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Lap	150.000.000
								Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	110.800.000
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dok	123.011.000
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan	Prosentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	80 %				90.580.000

					Tujuan Tertentu						
								Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	4 LAP	21.140.000
								Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu	70 LAP	69.440.000
		Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Sakip Kabupaten	75(BB)				1.255.340.000
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan Teknis yang dirumuskan	100 %				50.000.000
								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	50.000.000
					Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Prosentase rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi	65 %				1.205.340.000
								Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan	4 Perangkat Daerah	50.000.000

								tahan Daerah	dan Asistensi Urusan Pemerintahan		
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat daerah	62.640.000
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Keg	999.350.000
								Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72 Perangkat Daerah	93.350.000

Jember, 22 November 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER



INSPEKTORAT

RATNO C. SEMBODO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740827 200501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 JEMBER

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA /OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan penguatan aksi pencegahan korupsi	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan					
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik yang dipriksa	14 LHP	TW1= 3	
							TW2= 3	
							TW3=4	
							TW4=4	
Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan desa yang diterima Obrik	45 LHP	TW1=0					
			TW2=20					
			TW3=25					
			TW4=0					

			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil reviu Kinerja diterima OPD/Obrik	6 LHR	TW1= 0		
						TW2= 2		
						TW3=2		
						TW4=2		
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan diterima OPD/Obrik	32 LHR	TW1=13		
						TW2= 9		
						TW3= 7		
						TW4= 7		
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan yang diterima Obrik	70 LHP	TW1= 1		
						TW2= 63		
						TW3= 5		
						TW4=1		
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monev atas pemeriksaan BPK RI dan APIP yang terselsaikan	8 LAP	TW1=2		
						TW2=2		
						TW3=2		
						TW4=2		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kerugian daerah terselesaikan	4 LAP	TW1= 0	
							TW2= 0	
							TW3= 2	
							TW4= 2	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu	150 LHP	TW1=30					
			TW2=30					
			TW3=50					
			TW4=40					
Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi								

			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Dokumen SOP di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6 Dok	TW1=1 TW2=2 TW3=2 TW4=1	
			Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan Aistensi yang diterima obrik	5 LAP	TW1=0 TW2=5 TW3=5 TW4=0	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterima Obrik	15 LAP	TW1=0 TW2=0 TW3=10 TW4=0	
			Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan laporan progres pencegahan korupsi	4 LAP	TW1=0 TW2=2 TW3=2 TW4=2	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil pendampingan	4 Lap	TW1=0 TW2=1 TW3=1 TW4=1	

Jember, 22 November 2023


 INSPEKTUR
 KABUPATEN JEMBER
 INSPEKTORAT
RATNO C. SEMBODO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740827 200501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 J E M B E R

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNO C. SEMBODO, S.H

Jabatan : Inspektur Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



RATNO C. SEMBODO, S.H.
NIP. 19740827 2001501 1 006

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

INSPEKTORAT

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50 %
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 2

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11,129,076,141,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1,059,351,000,00	P-APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 1,255,340,000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 13,443,767,141,00	

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



RATNO C. SEMBODO, S.H.
NIP. 19740827 2001501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No 1 Telp / Fax (0331)428823 E-Mail : inspektorat@jemberkab.go.id

J E M B E R 68100

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Nomor : 700/ 6 / 35.09.410/2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 10. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 April 2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Kabupaten Jember

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Indikator Tujuan : Tingkat Maturitas SPIP

Lampiran IV : Capaian Inspektorat

DATA CAPAIAN
INSPEKTORAT KAB. JEMBER
2019 S.D 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		2021		2022		2023	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	MCP KPK			90	22	90	88	90	84	90	90
2	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 1	Level 3	Tidak mengajukan Penilaian	Level 3	Level 1	Level 2	Level 2 Skor 2,43	Level 2	Level 2 Skor 2,91
3	Maturitas SPIP				Tidak mengajukan Penilaian	Level 2	Level 2 Skor 2,403	Level 3	Level 2 Skor 2,971	Level 3	Level 3 Skor 3,059

INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT
RATNO C. SEMBODO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740827 200501 1 001